

Senin, 2 April 2012

HABIAN
analisa
Opini

Demonstrasi Bukan Perang

Oleh : Khalid, SH, M.Hum

Pascaputusan pemerintah menaikkan BBM mulai 1 April yang berujung pada unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen mulai dari mahasiswa hingga buruh semakin menandakan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Berbagai dialog di berbagai media juga diadakan guna mencari solusi menangani kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Namun pemerintah masih kukuh pada pendiriannya dengan alasan subsidi hanya dinikmati kalangan atas dan melambungnya harga minyak melebihi anggaran dalam APBN. Opsi-opsi lain juga ditawarkan oleh para pakar sebagai masukan pada pemerintah agar meninjau ulang kebijakan tersebut.

Jika dilihat alasan menghemat anggaran dengan menekan subsidi bukan merupakan win win solution. Kwik Kian Gie pada satu kesempatan sempat menyatakan jika alasan pemerintah menaikkan BBM hanya untuk menambah sisa anggaran agar dapat digunakan untuk keperluan lain dan hal ini tidak dibantah oleh pihak pemerintah sendiri yang juga hadir dalam forum yang sama.

Ujung dari kebijakan ini adalah penolakan masyarakat yang menjadi alasan

untuk aksi turun ke jalan guna menyampaikan aspirasi yang dalam negara demokrasi wajar terjadi. Namun pelanggaran justru hadir dari pihak pemerintah yang menggunakan kekuatan selain polisi.

Melibatkan Tentara

Sesuai permintaan Polri, TNI menyiapkan anggotanya untuk berjaga-jaga pada setiap daerah dimana terjadi titik demonstrasi. Hal ini kembali mengingatkan kita pada tahun 1998 dimana tragedi Trisakti dan Semanggi terjadi dan menelan korban jiwa. Pemerintah seperti menggunakan TNI sebagai alat politik untuk mempertahankan kebijakannya.

Unjuk rasa adalah bentuk penyaluran aspirasi dan ini bisa saja terjadi dengan damai selama tidak ada pihak yang terprovokasi, namun keberadaan TNI dapat saja menjadi penyebab hal itu. Alasan yang digunakan juga tidak logis, kalau hanya untuk pengamanan aksi, mengapa harus melibatkan TNI yang sejatinya memiliki tugas menjaga pertahanan negara. Peme-

rintah malah seperti menganggap unjuk rasa adalah sebuah bentuk kudeta terhadap rezim sehingga menghalalkan cara yang dianggap dapat mempertahankan kekuasaannya, salah satunya menggunakan alat negara sebagai tameng.

TNI yang semulanya netral, bisa saja menjadi alat politik yang membela penguasa untuk memaksakan kebijakan-kebijakan yang ditolak oleh rakyat, sehingga rakyat yang hanya punya suara kalah dan dapat diam melawan peluru runcing senjata api TNI. Walaupun latar belakang penguasa adalah TNI, sejatinya TNI harus bersikap netral dan menjaga posisinya agar tidak terjerumus pada kekuatan politik pemerintah, karena hal ini hanya membuat TNI menjadi pasukan loyalitas pemerintah.

Tugas ini seharusnya hanya menjadi milik Polri, karena merekalah yang memiliki tanggungjawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah personil Polri juga banyak, sehingga tidak ada alasan untuk mengikut sertakan TNI dalam

menjaga keamanan yang berujung pada kembalinya TNI memiliki dwifungsi seperti era Orde Baru. Melibatkan TNI juga mengindikasikan ketidakmampuan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga memaksa Polri melibatkan TNI dalam tugasnya.

UU TNI memang memberi jalan untuk membantu Polisi melalui Operasi Militer Selain Perang, namun harus berdasarkan persetujuan politik antara pemerintah dan DPR dimana Jimly Asshiddiqie mantan ketua MK telah mengklarifikasi hal tersebut.

Di lain hal, keterlibatan TNI rentan terhadap pelanggaran HAM dan memang bukan ranah umumnya untuk ikut dalam menjaga keamanan masyarakat, apalagi hanya berupa unjuk rasa. Sebagian pihak juga mengindikasikan pelanggaran UU TNI jika terlibat dalam pengamanan unjuk rasa, karena keputusan politik Presiden dan DPR belum terjadi.

Pendekatan Populis

Guna menjaga keamanan ketika aksi,

pemerintah dapat menggunakan cara populis yang membantu para pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya dengan damai sehingga terjadi saling membantu antara pihak pengamanan dengan pengunjuk rasa. Bila hal ini dilakukan, Polri sudah pasti mendapat simpati dari pengunjuk rasa dan tindakan anarkis dapat diminimalisir.

Bila melihat metode pengamanan saat ini, pihak pengamanan dan pengunjuk rasa rentan terjadi bentrokan, karena tidak terjalin hubungan sejak awal, sehingga mudah terprovokasi. Polisi karena menjaga ketertiban dapat saja menggunakan kekuatannya untuk menghentikan demonstrasi, sementara pengunjuk rasa akan semakin memiliki jarak dan menimbulkan kebencian pada Polisi.

Sejatinya unjuk rasa kenaikan BBM kali ini bukanlah aksi menggulingkan kekuasaan seperti yang terjadi di Libya dan Mesir, melainkan hanya penyampaian aspirasi. Sehingga tidak perlu seakan bersikap Offensif terhadap unjuk rasa tersebut yang malah akan membuat pemerintah menjadikan negara ini otoriter dengan kekuatan TNI seperti yang dilakukan Orde Baru.***

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.